

Bab IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Pemantauan yang dilakukan oleh JPPR Jambi telah menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa pelanggaran dalam proses penyelenggaraan Pemilu 2019. Pemantauan pemilu sendiri termasuk ke dalam sebuah kegiatan partisipasi politik dikarenakan adanya beberapa kriteria konsep partisipasi politik yang melekat pada kegiatan pemantauan pemilu. Melalui berbagai kegiatannya yang berkaitan dengan masyarakat, JPPR juga dapat dikategorikan sebagai aktor yang berupaya mendorong masyarakat dalam meningkatkan partisipasi politiknya juga pemahaman pendidikan politik itu penting.
2. JPPR Provinsi Jambi adalah sebuah lembaga pemantau pemilu yang *independen* dan tidak memihak dari kalangan elit atau partai manapun. Pemantau pemilu yaitu JPPR yaitu sebagai monitoring proses penyelenggaraan pemilu dalam mewujudkan demokrasi di Indonesia. Pemantau pemilu bisa menjadi tumpuan dalam demokratisasi Pemilu dan harus jadi alternative bagi upaya memperbaiki Pemilu.

4.2 Saran

1. JPPR Provinsi Jambi perlu melakukan penambahan agenda atau program-program yang konsisten dalam meningkatkan kinerja tahapan proses pelaksanaan penyelenggaraan sistem pemilihan umum. JPPR Jambi dapat memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas substansi kehidupan yang demokratis di Indonesia.
2. JPPR Jambi tetap bertahan dan eksis melakukan pemantauan di momen pemilu 2019, namun peneliti beranggapan bahwa JPPR Jambi perlu melakukan reformasi manajemen perekrutan anggota dapat berjalan dengan baik agar bertambahnya sumberdaya dalam menjalankan kegiatan-kegiatan di lapangan. Dalam keberlangsungannya, JPPR Jambi perlu memperluas perannya tidak hanya pada saat pemilu tapi juga terlibat dari hilir dalam hal prosesnya.